

INVESTASI PENDIDIKAN

Oleh : H. Dadang Suhardan

Abstrak

Pendidikan merupakan investasi yang paling berharga, namun pengembalian keuntungannya lama. Makin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin besar biaya yang dikeluarkannya. Seseorang yang memperoleh pendidikan paling tinggi, peluang untuk meraih kesempatan hidupnya semakin lebih baik sejalan dengan kecerdasan, keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Bangsa yang sejahtera penduduknya berpendidikan baik. Tak ada bangsa yang kaya dan modern sementara penduduknya buta huruf.

Kata Kunci: Masyarakat terdidik, *Human investment*.

Bilamana harus memilih, masyarakat mana yang akan diambil, apakah masyarakat tradisional kolot/'lagaard' ataukah masyarakat terdidik walaupun banyak penganggur. Nampaknya seperti memakan buah simalakama, memilih yang manapun tidak menguntungkan. Namun bagi aset pembangunan masyarakat terdidik tetap memiliki banyak kelebihan, yaitu memiliki 'stock common knowledge' yang sangat penting bagi pemecahan masalah sosial pembangunan, karena merupakan aset bagi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan *pis ical capital*. Kualitas masyarakat terdidik tetap lebih unggul kondisinya, lebih mudah menerima perubahan, rasional, memiliki pandangan kosmopolitan, jadi lebih cepat bagi terjadinya 'akselerasi pembangunan' karena selangkah berada di depan.

Tinggal menyediakan infra struktur ekonomi dan membuka lapangan kerja. Masyarakat tradisional masih jauh tertinggal untuk pembangunan, masih perlu kapital yang besar untuk menjadikannya terdidik.

1. Beyond The Success

Kembalian pendidikan ibarat menggantung asap, tidak semua orang beruntung meraih keberhasilan materi setelah lulus. Terlalu sulit dan panjang jalan yang harus ditempuh oleh seorang lulusan pendidikan untuk meraih keberhasilan seperti yang dicita-citakannya. Sukses tidak diperoleh dengan mudah, semudah mengkerdipkan mata yang sudah jenuh dengan membaca buku pada waktu belajar. Lama menunggu kembalian modal yang sudah diinvestasikan

sewaktu belajar. Harapan yang belum tentu terpenuhi, cita-cita sepanjang masa. Ironisnya setelah lulus ternyata menjadi penganggur.

Sebuah kisah nyata tentang “unemployed educated population dan implikasi memecahkannya”.

Sebut saja Sobarudin, nama seorang anak sabar, alumni lulusan IKIP, yang sekarang jadi UPI, sebuah perguruan tinggi di Bandung yang sedang naik daun. Lulusan jurusan Administrasi Pendidikan yang mengambil minor di program Biologi FPMIPA.

Kisahanya dimulai dengan penuh *sukacita* tatakala ia masih kebagian formulir pendaftaran masuk Perguruan Tinggi. Ia peroleh dengan keringat yang basah kuyup, tak ketinggalan rasa cape, haus dan lapar ketika antri untuk memperoleh sebuah formulir bagi dirinya, ia anggap sebagai *pengeluaran* selama usaha. Untuk memperoleh sebuah formulir ia harus *membayar langsung sebesar* Rp 35.000, ketika itu. Ongkos sebuah formulir yang mahal baginya, yang menjadikannya ia seorang alumni di kemudian hari. Uang itu baginya besar, sebab ia seorang anak kampung dari keluarga guru SD, pengeluaran sebesar itu ia anggap sebagai *investasi awal*. Ongkos lain yang

harus dikeluarkan untuk sampai ke Bandung dari desa, ikut nginap dan bayar makan serta transport, serasa tidak perlu dihitung karena *uang pengorbanan* yang turut membahagiakannya. Namun memperoleh sebuah formulir itulah yang dirasakannya bahagia karena menentukan jadi tidaknya diterima di IKIP.

Ia beruntung lulus saringan UMPTN, dan duduk mengikuti kuliah dengan tekun di barisan depan. Ketika harus ikut tentamen tengah dan akhir semester, ia mulai mengeluh karena untuk lulus sebuah mata kuliah *ternyata sulit dan tidak mudah*, karena harus menyelesaikan banyak tugas yang beruntun dari setiap mata kuliah. Cita-cita menjadi guru sebagaimana orang tuanya menggebu. Ia berkeinginan menjadi kepala sekolah yang mengerti Biologi, oleh karena itu ia mengambil Minor di jurusan Biologi.

Bulan demi bulan, semester demi semester dengan susah payah ia lunasi SPP nya, belum lagi bayar kontrakkan tiap tahun dan segala pengeluaran lainnya. 130 Sks dari jurusanya plus 27 sks dari jurusan Biologi telah dikantunginya. Untuk ujian S1, keluhan berikut menyusul, *betapa sulit untuk lulus* menyangg gelar sarjana pendidikan, penuh pengorbanan, termasuk

ketika mengikuti bimbingan menulis skripsi.

Semua pengeluaran uang ia anggap sebagai *biaya yang harus dikeluarkan* selama menempuh pendidikan, ia anggap sebagai *total educational coast*. Ketika sedang belajar *tawaran untuk nyambipun* tidak ia terima karena takut mengganggu konsentrasi belajarnya, ia anggap sebagai *earning for gone*. Selesai ujian sidang skripsi, ia memperoleh selebar kertas yang menyebutkan ia lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selebar kertas yang sama membahagiakan seperti ketika ia peroleh masuk IKIP.

Lima tahun berlalu setelah lulus. Izajahnya yang diterima dengan penuh kebanggan ketika di wisuda, sudah lecet dan kumal karena terlalu sering di bawa dan di foto copy, susah untuk mendaftar dan diterima sebagai guru honorer sekalipun. Telah puluhan kantor dan sekolah dimasuki untuk bisa mengajar, namun nasib belum mujur. Sobar dalam hatinya, teruslah kamu berusaha !

Ia berkesimpulan untuk diterima di perguruan tinggi susah, untuk lulus dari perguruan tinggi susah, cari kerja juga susah. Biaya yang harus dikeluarkan juga susah didapat padahal sangat besar telah ia keluarkan.

Janjikan *benefit* dia peroleh, untuk hidup bersahaja saja tak cukup bagi dirinya. Namun ia *punya benefit lain*, yaitu tekad kuat untuk tidak menyerah kepada kondisi yang menimpanya.

Begitu letih mencari pekerjaan yang belum diperoleh, ia terduduk keletihan dibawah pohon dekat pembuangan sampah. Tertidur dibawah pohon di pembuangan sampah, itulah perjuangan seorang sarjana lulusan perguruan tinggi untuk mencari pekerjaan, guna memperoleh *rate of return* dan biaya hidup bagi dirinya.

Bunyi mobil pembuang sampah dan hiruk pikuk pemulung mengais sampah, *membangun-kan dirinya dan memberinya muzizat*. Ia melihat pemulung tanpa ketrampilan, bukan sarjana, terlihat riang tanpa mengeluarkan mengais sampah, buat biaya hidupnya.

Sobar berfikir, saya sarjana, mengerti biologi, mengapa tidak memanfaatkan sampah sebagai penghidupan saya. Saya mengerti bagaimana sampah organik harus dipisahkan dari sampah anorganik. *Implikasinya* ia harus mengubah paradigma berfikir dari menjadi pegawai kepada wirausaha, karena memiliki pengetahuan ilmu biologi yang diterima diperkulihannya.

Ia mulai merintis industri sampah menjadi pupuk organik buat tanaman hias di taman perumahan. Ia kembali masuk rumah kerumah, tapi bukan untuk melamar pekerjaan, melainkan menjajakan sampah organik untuk penyubur tanaman, masuk dan keluar rumah gedongan sambil medorong gerobak berisi kemasan pupuk organik bermerek "PUPUK SARJANA", sampai akhirnya memiliki banyak langganan pupuk organik buatannya. Dari situ dia mulai membangun karya, dan lapangan kerja, membangun industri pupuk buatan dan pupuk tanaman hias untuk mensuply kebutuhan rumah dan pelanggan penjual bunga hias. Satu tahun dia sudah terbeli truk untuk mengantar, tiga tahun kemudian *ia peroleh earning sebagai rate of return* kuliahnya. Ia pulang kampung naik Toyota Corola sedan yang menjadi impiannya semasa melihat dosennya memberi kuliah.

2. Kualitas Populasi Penduduk

Jumlah penduduk merupakan aset negara, ia merupakan stok suatu bangsa, apabila kualitasnya bagus maka ia merupakan human capital yang dapat memuluskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam suatu negara. Sebaliknya jika kualitas penduduknya buruk ia akan menjadi beban pemerintah yang harus diberi konsumsi

supaya tidak menjadi mala-petaka.

Theodore Shultz (2000:xi) seorang ahli ekonomi negara berkembang pemegang hadiah Nobel dibidang Ekonomi, mengklaim bahwa "... improving the welfare of poor people did not depend on land, equipment, or energi but rather on knowledge. ... this kualitatif aspect of economics". He called this kualitatif aspect of economics "human capital".

Menurut Schultz, untuk membangun masyarakat miskin tidak harus tergantung pada tanah, *equipment*, atau energi tetapi pada membangun pengetahuannya, yang berupa aspek ekonomi kualitatif, yang disebutnya *human capital*.

Penduduk dengan jumlah yang banyak merupakan modal pembangunan suatu bangsa jika kualitas pengetahuannya memadai. Tetapi jika kualitas pengetahuannya rendah atau buta huruf, mereka tidak akan banyak berdaya. Penduduk yang kemampuannya sekualitas buta huruf tidak banyak yang dapat dilakukan, jangankan memecahkan masalah melalui penelitian atau teknologi canggih yang rumit, untuk mengatasi kebutuhan mendasar berupa pangan saja harus disediakan negara donor, bukannya memproduksi sendiri. Ia tidak sanggup mem-

produksi kebutuhan pokoknya, karena ketidak berdayaan dirinya, karena tidak memiliki pengetahuan.

Selanjutnya T. Shultz dalam tulisannya yang lain berjudul "Education and Population Quality" mengemukakan "It is useful to think of population quality as derived from two sources, namely, genetic endowment and acquired ability. Education is a major sources of acquired abilities. (Schultz, 2000:11).

Menurutnya, sangat baik untuk memikirkan tentang kualitas populasi yang sumbernya berasal dari dua macam, dinamakan; genetik pembawaan dan kemampuan yang diperoleh dari hasil belajar. Pendidikan merupakan *sources* utama kemampuan yang diperoleh dari hasil belajar.

Dibalik kesuksesan seseorang seperti digambarkan dalam pendahuluan di atas dalam tulisan ini memberi gambaran bahwa; selama hidupnya menjadi pemulung, ia terus bergelut dengan sampah sebagai pemulung, di tempat yang sama dengan cara yang sama. Tidak ada perubahan cara hidup dengan mengubah paradigma, seperti Sobarudin, dari penjaja izajah menjadi seorang penjaja "Pupuk Sarjana". Ia menjadi seorang wirausaha karena ia seorang

sarjana Pendidikan yang juga berpengetahuan Biologi. Pemulung asal, tetap saja pemulung sampah karena tidak punya pengetahuan alias buta huruf. Jika suatu negara berpenduduk sekualitas butahuruf pemulung seperti di atas, perubahan untuk membangun bangsa tidak akan terjadi, paling tidak sangat lambat, negara tetap berada dalam kondisi yang sama, mengandalkan kepada situasi yang sama seperti apa adanya semula. Oleh karena itu kualitas populasi penduduk suatu bangsa dimulai dan di sebabkan karena pengetahuan yang diperoleh dari pendidikannya. Menurut Commission on Teacher Education, Washington DC (1944:2) dikutip dari Innovation in Teacher Education (1977:x), kualitas suatu bangsa tergantung pada kualitas penduduknya, dan kualitas penduduk tergantung pada kualitas pendidikan yang diperolehnya. "The quality of nation depends upon the quality of its citizen. The quality of its citizen depends- not exclusively, but its critical measure - upon the quality of their education".

Manusia berpengetahuan merupakan aset bangsa, merupakan human capital. Ia menjadi stok bagi *problem solving* pembangunan nasional, sebagaimana diungkapkan oleh pemenang hadiah Nobel Ekonomi Schultz, lakukanlah investasi kualitatif

pada manusianya, sebab manusia berpendidikan memiliki pengetahuan untuk modal bekerja, ia disebut sebagai investasi *Human Capital*.

Woodhall dalam tulisannya *Human Capital Concepts* (1987: 21) mengemukakan bahwa konsep *human capital* berhubungan dengan kenyataan bahwa manusia berinvestasi dalam dirinya sendiri melalui pendidikan, latihan dan kegiatan lain yang dapat menghasilkan pendapatan dikemudian hari sejalan dengan perjalanan waktu hidupnya. Menurut teori ekonomi disebut "investasi". "The concept of human capital refers to the fact that human beings invest themselves, by means of education, training or other activities, which raises the future time by increasing their life time earnings".

3. Masyarakat Terdidik Lebih Baik Dari Yang Tradisional

Dalam teori *human capital*, pendidikan tidak langsung menyumbang kepada peningkatan produktivitas, melainkan lewat kemampuan, pengetahuan dan keterampilan orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya. Makin luas pengetahuan seorang pegawai, makin cerdas dan cekatan ketrampilan kerjanya. Menurut teori *human capital*, bila seseorang diberi pendidikan, di kemudian hari produkti-

vas kerjanya akan berkembang, karena seseorang memiliki pengetahuan dan kecakapan bagaimana melaksanakan pekerjaannya secara lebih baik. Pengetahuan yang dimilikinya berpengaruh terhadap cara kerja dan pemecahan masalah, yang diperlukan untuk mengatasi persoalan dalam bekerja, akibatnya produktivitas meningkat.

Pengetahuan yang dimiliki perorangan akan menjadi 'stock knowledge' bagi masyarakat suatu bangsa. Bilamana setiap individu dalam masyarakat terdidik ia akan menjadi modal bangsa dalam bentuk 'stock common knowledge'. Kualitas masyarakat terbentuk karena warganya, karena individunya. Bilamana individunya terdidik ia menjadi masyarakat berpengetahuan yang akan berbeda dengan masyarakat tradisional. Ciri masyarakat terdidik adalah berfikiran kosmopolitan, yaitu berfikiran maju, luas, melihat kedepan dan mudah menerima perubahan. Kehidupan seperti ini menjadi dambaan bangsa yang maju, karena *social environment of society*-nya kondusif, didukung oleh individu terdidik yang kosmopolitan.

Masyarakat buta huruf cenderung tradisional, tidak banyak berbuat, tidak mampu melihat kekurangan yang sedang terjadi pada dirinya, karena memikirkan kemalangan hidupnya. Karak-

teristik masyarakat tradisional menurut Rogers (1971:12) dilukiskan sebagai :

1. Lack of favorable orientation to change
2. A. Less develop or 'simpler' technology
3. A relatively low level of literacy, education, and understanding of the scientific method
4. Status quo in the social sistem
5. Little communication, lack of transportation facilities and communication, relative isolated
6. Lack of ability to emphasize or to see oneself in other's role, particularly the role of outsiders to the sistem.

Edwin Tobing dalam; *Education, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi* (<http://www.uvm.edu/~nerane/estyles/apa.html>, 13 Nov 2002), mengemukakan bahwa; Studi yang dilakukan Prof. Ekonomi dari Harvard, Dale Jorgenson et al. (1987) pada ekonomi Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-79 misalnya menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (*capita formation*), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia (*human capital. Pen*), serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi.

Selanjutnya Edwin Tobing mengemukakan pula bahwa; Tetapi sesungguhnya faktor teknologi dan modal fisik tidak independen dari faktor manusia. Suatu bangsa dapat mewujudkan kemajuan teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik seperti bangunan dan peralatan mesin-mesin hanya jika negara tersebut memiliki modal manusia yang kuat dan berkualitas. Bila demikian, secara tidak langsung kontribusi faktor manusia dalam pertumbuhan penduduk seharusnya lebih tinggi dari angka 31 persen.

Mencermati pernyataan Edwin Tobing tersebut, rupanya bagi bangsa kita yang sedang dilanda krisis multi dimensi yang terperosok kedalam berbagai kesulitan nasional sehingga sulit mencari jalan keluar, mau dari sisi mana pemecahannya dimulai. Modal teknologi, kita tidak memilikinya, modal uang apalagi kecuali utang yang besar, manajemen nasional yang penuh korup dan KKN, tinggal satu hal yang seharusnya masih dapat diandalkan yaitu komitmen politik nasional untuk berinvestasi pada humannya, sebab melahirkan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan yang dibutuhkan dibalik semua pekerjaan yang harus digarap.

4. Unemployment And Education

Siapakah yang bertanggung-jawab jika seseorang yang telah menyelesaikan studi kemudian menganggur karena tidak memperoleh pekerjaan. Sangat sulit untuk mencari jawaban yang tepat, tetapi mari kita analisis masalah berikut ini: (1) Relevansi Pendidikan dan (2) Akuntabilitas pendidikan

1. Relevansi Pendidikan

Istilah relevansi pendidikan merupakan istilah yang berarti jamak, sebab relevansi mempunyai arti; keterhubungan atau sangkut paut, kait mengait, dan kegunaan (KBBI, 1997:830). Artinya pendidikan mau di relevan dengan masalah apa. Apa masalah relevansinya dengan masa depan?, dengan kehidupan sosial?, dengan kepentingan para politisi, dengan pembangunan ekonomi, pemberantasan buta huruf atau dengan lapangan kerja itu sendiri sesuai judul tulisan ini.

Jawaban masalah relevansi itu ternyata tidak mudah, sebab menyangkut tentang visi dan filosofi bangsa, menyangkut konsepsi pendidikan dan perencanaan masa depan bangsa.

Selain masalah relevansi, Indonesia dihadapkan kepada tiga masalah besar dalam bidang

pendidikan yaitu, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas.

Masalah *pemerataan* itu sendiri “baru dijawab dengan wajib belajar” sembilan tahun yang tidak jelas ketentuan dan realisasinya. Sebab kenyataannya pemerintah tidak punya kemampuan membiayai kata yang diucapkannya sendiri sebagai wajib belajar. Pemerintah setengah hati melakukan wajib belajar, kenyataannya wajib belajar tidak ada sanksi apapun kepada anggota masyarakat yang tidak memenuhinya. Pemerintah sendiri tidak mau mengeluarkan anggaran yang memadai untuk membiayainya, pendidikan tetap tanggungjawab orang tua dan masyarakat.

Efisiensi dalam arti pengendalian anggaran, barangkali dapat dijawab ya, sebab kenyataannya pemerintah hanya mengalokasikan 3,4 % anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan. Bahkan sebesar apapun demo guru untuk meminta kenaikan gajinya yang sudah tidak layak untuk hidup sebagai anggota masyarakat normal, tidak lagi diperhatikan. Belum pernah terdengar pemerintah membayar gaji guru setahun lebih dari 13 bulan seperti di Singapura dan Malaysia, yang membayarnya sampai 18 bulan.

Efektivitas pendidikan dalam mencapai tujuan juga masih dipertanyakan, sebab keterkaitan

dengan tujuan yang mana. Pemborosan pendidikan, kesepadan, sekolah pembangunan misalnya tidak pernah terdengar lagi kelanjutannya. Program-program dalam rangka menemukan bentuk atau sistem penyelenggaraan yang paling efektif selalu kandas di perjalanan. Selesai proyek, ganti pejabat, selesai pula proyek dan programnya, tidak lagi terdengar kelanjutannya.

Relevansi, apabila relevansi diartikan sebagai keterkaitan pendidikan dan kegunaannya, terutama keterkaitan dengan lapangan kerja, dan lulusannya diserap kedalam dunia kerja. Masalah ini merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang belum stabil dalam banyak hal, termasuk perencanaan dan proyeksi ketanaga kerjaan. Indonesia belum memiliki peta tenaga kerja yang harus di sediakan pendidikan. Sekarang ini berlaku teori *supply-deman* menurut pasar, tidak dalam kendali program. Dalam arti lapangan kerja telah dipetakan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi bangsa, sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat diramalkan dan diproyeksikan. Dengan demikian pendidikan dapat mempersiapkan kebutuhan tenaga yang diperlukan di berbagai sektor ekonomi. Jadi

pengganguran termasuk pengangguran terdidik akan dapat direduksi seminimal mungkin sebab ada keterkaitan antara dunia kerja dan sistem pendidikan. Para perencana pendidikan dan para perencana ekonomi, wakil-wakilnya duduk bersama menyusun program kerja untuk membuat peta kedua masalah ini, yaitu pendidikan sebagai penghasil sumberdaya manusia dan para ekonomi sebagai pengguna, membuat kesepakatan proyeksi sehingga terjadi korespondensi diantara keduanya. Di negara yang sudah maju sekalipun masalah seperti ini sulit direalisasikan, namun jika para perencana pendidikan dan ekonom punya komitmen terhadap masa depan bangsa, mengapa tidak mungkin dilakukan. Sebagaimana dikemukakan Levin, (1987 : 150). "The corresponden between the educational system and the system of work is less of mistery in Estern Europe and the planned economic, where central planning of both education and the planned economy are coordinated, ...countries use manpower planning approaches to relate economics out put to occopational needs and schooling requirements".

2. Akuntabilitas Pendidikan

Akuntabilitas merupakan usaha untuk memberi perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, perlindungan terhadap yang lemah, berupa kontrol sosial. Terutama perlindungan terhadap pengguna jasa, terhadap konsumen. Apakah pendidikan yang ditempuhnya bermanfaat atau tidak bagi dirinya dikemudian hari. Dengan adanya akuntabilitas, maka penyelenggara pendidikan tidak akan sembarangan menyelenggarakan pendidikan, sebab diawasi dan dikontrol masyarakat melalui sosial kontrol.

Proses akuntabilitas dilakukan secara periodik dan bersama-sama, didalamnya terkait transparansi. Kedua belah pihak baik individu pengguna jasa maupun organisasi penyelenggara secara demokratis menilai kekuatan dan kelemahan pendidikan yang mereka selenggarakan, baik proses maupun produknya.

Menurut Neave, G, dalam tulisannya berjudul *Accountability in Education*. (1987:73). Di negara maju seperti Inggris akuntabilitas dilakukan kepada :

1. Individual parents and pupils
2. Pupils and parents as part of the community
3. Teachers' employes (local education authority)

4. Professional peers inside and out side school
5. Providers of resources – viz local education authoroties and central government
6. Outher relevant institutions, e.q. universities
7. The Public
8. Industry, including the trade union

Sekiranya akuntabilitas pendidikan mendapat perhatian dan dapat dilaksanakan di Indonesia secara jujur, mungkin *unemployment educated population* akan dapat ditekan seminimal mungkin, sebab penyelenggara pendidikan harus bertanggung jawab kepada semua pihak, terutama kepada murid yang menjadi lulusannya. Dengan adanya akuntabilitas proses dan produk pendidikan dilakukan secara benar, tidak 'berdagang papan nama' dan tidak menyebabkan malapetaka bagi lulusannya kerana lulusannya dicari dunia kerja

5. Penyebab Unemployed Educated Population Serta Implikasinya

1. Penyebab

Akibat tidak adanya korespondensi antara perencana ekonomi dan para perencana pendidikan, akan terjadi kesenjangan diantara kedua belah pihak. Pendidikan maupun ekonomi berjalan

masing-masing, tanpa saling menguntungkan dan melengkapi. Semestinya pendidikan mempersiapkan tenaga cakap yang dibutuhkan ekonomi, dan ekonomi berkembang dikendalikan oleh tenaga cakap hasil pendidikan. Koordinasi diantara kedua sektor ini akan menjadikan negara maju dan berkembang secara sinergi.

Unemployment educated population sering terjadi di negara-negara berkembang akibat tidak adanya kebijaksanaan untuk mensinkronisasikan perencanaan, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu *implikasinya* perlu ada kebijaksanaan yang mengikat, supaya kedua masalah ini terjembatani, dan ada koordinasi secara terpadu. Pendidikan mempersiapkan program-program yang menghasilkan tenaga kerja sebagaimana dipersyaratkan dunia kerja, ekonomi dan pembangunan memanfaatkan SDM yang cakap – profesional supaya laju pertumbuhan ekonomi berjalan kokoh. Disamping itu pendidikanpun menyelenggarakan program-program unggulannya.

Unemployment educated population di negara-negara berkembang terjadi karena :

1. Pendidikan diselenggarakan hanya untuk memenuhi tuntutan politik semata, menutupi program yang sudah terlanjur dikampanyekan

baik di dalam negrinya maupun terhadap dunia luar. Pendidikan sekadar pemenuhan hak bangsa, bumbu politik, pemerintah memang telah melaksanakannya. Bukan dasar untuk membangun bangsa dalam arti yang sesungguhnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak sebagai kewajiban.

2. Anggaran belanja nasional untuk sektor pendidikan terlalu rendah, sehingga tidak banyak yang bisa dibiayai. Program-program pendidikan yang berkualitas memerlukan biaya yang relatif mahal, sehingga dengan anggaran kecil tak akan dapat menjangkau program berkualitas.
3. Pendidikan hanya sebatas komoditi politik, bukan komitmen untuk mencerdaskan bangsa yang sesungguhnya.
4. Pendidikan hanya berorientasi formal, untuk status sosial, untuk memperoleh ijazah, bukan diorientasikan bagi memenuhi pembangunan nasional
5. Tidak ada informasi dan kebutuhan pasar kerja serta jenis lapangan kerja lowong yang harus diisi, baik jenis tenaga, maupun lowongan pekerjaannya. Dunia kerja sangat enggan berkomunikasi dengan dunia pendidikan, tak ada koordinasi.

2. Implikasinya

Untuk mereduksi *unemployment educated population*, hemat penulis perlu ada komitmen politik berupa kebijaksanaan yang mengikat pemerintah dan para pelaksana di tingkat operasional yang sungguh sungguh untuk menjadikan pendidikan sebagai **human investment** jika memang negara ingin maju. Tanpa SDM potensial yang dibina secara berkualitas, disiapkan sejak sekarang, dengan tekad dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan aparat pelaksananya, sukar masa depan bangsa dapat diramalkan akan lebih baik. Oleh karena *human investment* perlu keseriusan bangsa, sebab prosesnya lama, biayanya mahal, namun hasilnya pasti menjanjikan. *Human investment* tak dapat disulap memakai Lampu Aladin.

Kongkritnya pemerintah harus melakukan langkah - langkah nyata berupa :

1. Melakukan sinkronisasi perencanaan sejak dini antara perencanaan ekonomi dan perencanaan pendidikan.
2. Menggalakkan usaha wira-swasta, pendidikan juga diorientasikan untuk mempersiapkan tenaga trampil membuka lapangan kerja, seperti kasus Sobaruddin dengan "pupuk Sarjananya".
3. Pembukaan jenis pembangunan yang padat usaha

menyerap tenaga kerja terdidik.

4. Komunikasi dan Informasi tentang lowongan kerja yang teratur, serta pembukaan program pendidikan sesuai *requirement* dunia kerja.
5. Memperbesar angka anggaran biaya untuk pendidikan, bukan sekadar retorika politik, atau untuk komoditi politik.
6. Pajak pendidikan yang secara jujur dialokasikan dan disampaikan benar-benar untuk pendidikan.

Menurut Richard M. Bird:

"The main challenge in adapting the tax policy of developing countries to provide employment is how to rationalize factor prices directly. There are so many tax policies in developing countries which demonstrably go in the wrong direction that there is much to be done.... The unemployment problem in developing countries is predominantly a problem of un skilled workers-though not entirely so, as the oft-published "educated unemployed". Taxation policy can play a role in influencing the skill level of the labor force. (1993:73-75).

4.3. Masalah Lapangan Kerja dan Unemployed Educated

Diasumsikan bahwa untuk Indonesia laju pertumbuhan angkatan kerja usia 10-21 tahun akan terus meningkat di atas 2000.000 orang pertahun (diambil atas perkiraan Pelita IV-V, data tahun '80-'90-an), namun pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah usia pencari kerja. Secara keseluruhan terdapat banyak kekurangan penciptaan lapangan kerja, terutama dikalangan terdidik mengakibatkan terjadinya *unemployment educated population*. Selain tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antar departemen dalam penyediaan lapangan kerja bagi lulusan tenaga terdidik, juga karena mereka ditambah dengan yang migrasi dari desa ke kota, berhubung pendidikan di perkotaan relatif maju dan disitu pula lapangan kerja dipersaingkan diantara mereka. Di Pulau Jawa tempat dimana penduduk paling padat, pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan mencapai 60% - 70% dari jumlah seluruh angkatan kerja nasional. Sedangkan pertumbuhan lapangan kerja di asumsikan hanya mencapai 78.000 lowongan saja, artinya terdapat kesenjangan yang sangat besar.

Sebagai bahan studi, berikut ini dapat dibaca angka yang mem-

pesona mengenai data angkatan kerja di Indonesia walaupun sudah kedaluwarsa. Bilamana ditinjau dari segi pendidikan, maka angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SLA Kejuruan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tercepat (14,3%), disusul dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja Akademi / Perguruan Tinggi (10,7%), SLA umum (7,5%), SD (6,6%), dan belum tamat SD (6,4%). Angkatan kerja yang tidak berpendidikan sekolah dasar sampai dengan SLTA meningkat dari 28,8% menjadi 34,8%. (Perkembangan Lapangan Kerja di Indonesia Dalam Dekade 1980an, Sayuti Hasi-buan, 1982: 89-90).

Persoalan yang pelik adalah Indonesia menghadapai "kekurangan karena kelangkaan sarjana dengan keahlian yang benar-benar diperlukan oleh dunia kerja, kelangkaan keahlian tenaga kerja cendekiawan yang memenuhi requirement dunia kerja saat dunia kerja memerlukan tenaga pembangun industri". Tenaga angkatan kerja yang tersedia melebihi keperluan dunia kerja adalah mereka yang berpredikat sarjana diluar keperluan dunia kerja atau tidak tersalurkan.

Mulai tahun 1997 Indonesia dilanda krisis multi dimensi yang menyebabkan terjadinya

PHK besar-besaran, sehingga sampai sekarang ini, selain usia pencari kerja banyak yang belum tersalurkan atau memperoleh pekerjaan, mereka masih nganggur ditambah lagi penganggur yang datang dari PHK akibat krisis ekonomi. Ledakan penganggur terjadi karena krisis ekonomi menambah parah kondisi angkatan kerja dibanding lowongan kerja. Jika diasumsikan mencapai 45 % dari semua tenaga kerja aktif (yang sedang berkerja = 55%) maka jumlah penganggur cukup membahayakan kesehatan bangsa dalam jangka panjang.

Yang disebut penganggur menurut BPS, adalah mereka yang dalam seminggu tidak memperoleh pekerjaan kurang dari setengah jam. Pengertian ini bukan didasarkan kepada lamanya bekerja secara seharusnya yaitu 40 jam perminggu. Dalam kondisi 40 jam perminggu diperkirakan setiap pekerja memperoleh UMR yang memadai sehingga mampu menutupi keperluan hidup layak. Namun bilamana bekerja minimal perminggu terpenuhi dan sanggup mencukupi kebutuhan hidup layak, mereka tidak termasuk golongan miskin. Mereka termasuk golongan yang sanggup menolong dirinya sendiri. Kebanyakan pencari dan angkatan kerja dan termasuk yang di PHK adalah mereka yang terdidik.

Pengertian *unemployment* menurut ILO (1987:173) datang dari kemungkinan berikut ini :

1. Mereka yang bekerja karena tidak mempunyai keahlian atau ketrampilan, mengerjakan apa saja di suatu perusahaan yang mempekerjakannya, yang penting mendapat upah. Perusahaan mengontrak mereka bila mana akumulasi pekerjaan di perusahaan bertambah, bilamana habis pekerjaannya, kontraknya juga selesai. Kemudian mereka menjadi unemploymen.
2. Mereka yang siap bekerja, namun karena tidak memperoleh tempat yang sesuai dengan keinginan dan latar belakang pendidikan mereka, mereka memilih untuk tidak bekerja.
3. Mereka yang bekerja secara sukarela, tanpa dibayar, lantas berhenti tidak melanjutkan kesukarelaannya lagi.
4. Mereka yang berkerja secara musiman, hanya bekerja jika musim pekerjaan itu ada.

Menurut ILO kelompok dibawah ini tidak termasuk kedalam kelompok seperti di atas :

1. Mereka yang membuka usaha sendiri misalnya petani, penggarap farm
2. Pekerja keluarga dalam lingkungan keluarga sendiri.

KEPUSTAKAAN

- Anderson Lascelles, Douglas M
Windham (1982) *Educational
And Development*.
Lexinton Books, Toronto.
- Balai Pustaka (1997) *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*.
Depdikbud.
- Becker Gary S (1993) *Human
Capital*. A theortized and
Empirical Analysis with
Special Reference to Edu-
cation. Chicago and Lon-
don, The University of
Chicago Press.
- Bird M, Richard (1993) *Tax
Policy and Economic
Development*. Baltimore
and London The Johns
Hopkins University Press.
- Edwin Tobing
<http://www.uvm.edu/nerane/estyles/apa.html>, 13
November 2002), *Pendidikan
dan Pertumbuhan
Ekonomi*.
- Fitz-enz (2000) *The ROI Of
Human Capital*. Measu-
ring The Economic Value
of Employee Performance.
Amacom Toronto.
- Levin HM (1987) *Work And
Education. Economics Of
Education Research and
Studies*. Toronto. Perga-
mon Press.
- Sayuti Hasibuan, dkk. (1982)
*Sumber Daya Manusia
Kesempatan Kerja dan
Pembanguna Ekonomi*.
Jakarta, Fakultas Ekonomi
UI.
- Neave G (1987) *Acuntability In
Education Economics Of
Education Research and
Studies*. Toronto. Perga-
mon Press.
- Rogers Evert M. (1971)
*Communication Of Inno-
vation*, New York, Mac
Millan Publishing.
- Shultz T.W. (1987) *Education
And Population Quality.
Economics Of Education
Research and Studies*.
Toronto. Pergamon Press.
- Turney C (1977) *Innovation in
Teacher Education*, Sid-
ney, Sidney University
Press.
- Woodhall (1987) *Human Capital
Concepts Economics Of
Education Research and
Studies*. Toronto. Perga-
mon Press.

Penulis:

Drs. H. Dadang Suhardan, M.Pd.
Staf Pengajar di Jurusan Admini-
strasi Pendidikan FIP UPI.
Kandidat Doktor pada program
studi Administrasi Pendidikan
PPS UPI.